

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab penutup ini akan dijelaskan mengenai hasil dari proses penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari proses analisis.

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan sebelumnya, dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mengukur tingkat efektivitas digunakan 4 variabel yaitu ketepatan sasaran, sosialisai program, Tujuan program dan pemantauan program, yang dijabarkan sebagai berikut:
  - a Tingkat efektivitas program KOTAKU Kota Semarang dilihat dari variabel ketepatan sasaran sangat efektif dengan rata-rata persentase efektivitas sebesar 84%. Didukung juga dengan hasil analisis secara kualitatif yaitu melalui wawancara beberapa responden baik pemerintah maupun masyarakat dimana lokasi penerima bantuan peningkatan kualitas permukiman kumuh sudah berdasarkan SK penetapan lokasi permukiman kumuh di Kota Semarang, sehingga secara administrasi sasaran program tersebut tepat sasaran.
  - b Tingkat efektivitas program KOTAKU Kota Semarang dilihat dari variabel sosialisasi program sangat efektif dengan rata-rata persentase efektivitas sebesar 81%. Didukung juga dengan hasil analisis secara kualitatif yaitu melalui wawancara beberapa responden baik pemerintah maupun masyarakat. Disamping itu bahwa sosialisasi sudah dilakukan oleh tim pendamping atau fasilitaor sebelum pelaksanaan program baik melalui acara pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat, maupun dengan memasang spanduk dan penyebaran brosur tentang gambaran umum program KOTAKU. Dengan demikian sebagian besar masyarakat penerima bantuan

program KOTAKU mengetahui gambaran umum dan tujuan dari program KOTAKU.

- c Tingkat efektivitas program KOTAKU Kota Semarang dilihat dari variabel tujuan program adalah sangat efektif dengan rata-rata persentase efektivitas sebesar 87%. Didukung juga dengan hasil analisis secara kualitatif yaitu melalui data sekunder, observasi dan wawancara beberapa responden baik pemerintah maupun masyarakat dimana Dengan pelaksanaan program KOTAKU yang telah dilaksanakan di Kota Semarang selama 2 tahun yaitu pada tahun 2017-2018 telah terjadi peningkatan kualitas infrastruktur dilingkungan permukiman kumuh sehingga secara langsung akan mengurangi jumlah luasan permukiman kumuh di Kota Semarang. Berdasarkan data hasil perhitungan pengurangan luas permukiman kumuh di Kota Semarang khususnya wilayah penelitian (Kelurahan Purwosari, Kelurahan Srandol Kulon, Kelurahan Banjardowo dan Kelurahan Sawah Besar) terdapat pengurangan luasan permukiman kumuh sebesar 2,63 Ha di tahun 2017 dan 14,01 Ha di tahun 2018.
- d Tingkat efektivitas program KOTAKU Kota Semarang dilihat dari variabel pemantauan program adalah sangat efektif dengan rata-rata persentase efektivitas sebesar 83 %. Didukung juga dengan hasil analisis secara kualitatif yaitu melalui wawancara beberapa responden baik pemerintah maupun masyarakat dimana pemantauan program di lakukan baik oleh pemerintah maupun tim fasilitator. Pemerintah sebagai pokja PKP menyusun dari awal persiapan program, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Pemantauan Program perlu dilakukan supaya hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan dan sasaran dari program. Tim fasilitator memantau program dengan cara mengevaluasi hasil perencanaan yang dilakukan masyarakat apakah sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian melakukan monitoring kualitas dan kuantitas pekerjaan dengan cara

melakukan opname pekerjaan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah dibuat.

- e Nilai rata-rata persentase efektivitas program KOTAKU Kota Semarang dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Kota Semarang yang terdiri dari 4 variabel dan 17 indikator penilaian, diperoleh nilai rata-rata persentase efektivitas sebesar 84%. Dengan merujuk standar ukuran efektivitas sesuai acuan Litbang Depdagri dengan rasio  $>80\%$  maka rata-rata tingkat efektivitas adalah “sangat efektif”.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat efektivitas Program KOTAKU dalam Mengurangi Luasan Permukiman Kumuh di Kota Semarang diantaranya:

### 1. Faktor Pendukung

#### a. SDM

- Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan program dari SDM masyarakat adalah ketersediaan dan keikhlasan masyarakat dalam mendukung program. Partisipasi dari masyarakat secara luas untuk memiliki kesadaran perbaikan dan menjaga lingkungan permukiman kumuh merupakan salah satu faktor kunci.

- Pemerintah

Pemerintah sebagai Pokja PKP yang dipimpin oleh Bappeda menyusun dari awal program, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Jadi peranan Pokja PKP sebagai perumus kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh ditingkat Kabupaten/Kota merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas program KOTAKU dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Kota Semarang. Pokja PKP terdiri dari: Bappeda,

Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

- Fasilitator

SDM pendamping atau fasilitator baik kualitas maupun kuantitas fasilitator merupakan salah satu faktor keberhasilan efektivitas program. Dimana tugas fasilitator sebagai pendamping masyarakat, merupakan garda terdepan dari berhasil atau tidaknya suatu program. Bagaimana fasilitator memberi pemahaman kepada masyarakat tentang program, memberi pemahaman dan mengidentifikasi permasalahan lingkungan, melakukan perencanaan yang benar serta melakukan pendampingan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Semua itu tergantung kemampuan SDM dari masing-masing fasilitator, kuantitas atau jumlah tatap muka pendamping dengan masyarakat juga mempengaruhi efektivitas program. Dengan adanya fasilitator atau pendamping di masing-masing deliniasi permukiman kumuh, maka akan sangat membantu masyarakat dalam pelaksanaan program mulai dari awal persiapan sampai pelaksanaan kegiatan.

b. Anggaran

Besarnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui program KOTAKU merupakan salah satu faktor pendukung efektivitas program KOTAKU. Semakin besar jumlah anggaran yang diberikan, maka semakin banyak volume kegiatan yang bisa dilakukan. Sehingga permukiman kumuh yang ditangani semakin banyak dan berdampak kepada besarnya pengurangan luas permukiman kumuh yang di Kota Semarang

c. Perencanaan

Perencanaan ditingkat kabupaten/ kota (RP2KP-KP) dikoordinasikan oleh Pokja PKP dan ditingkat kelurahan/desa (RPLP) dikoordinasikan oleh TIPP. Tahap ini merupakan tahapan

yang penting dalam menggunakan sumber data dan informasi yang sama dari hasil konsolidasi data berbagai sektor dan aktor terkait permukiman dan perumahan. Oleh karena itu tahap perencanaan adalah proses kunci dalam menyusun pemecahan masalah bersama dan membangun komitmen pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh melalui penyusunan rencana penanganan dan pencegahan kumuh baik di tingkat kota maupun ditingkat kelurahan.

## 2. Faktor penghambat

### a. Tidak ada Kolaborasi Anggaran

Keterbatasan anggaran yang diperoleh menjadi faktor penghambat efektivitas program KOTAKU dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Kota Semarang. Pelaksanaan program KOTAKU hanya berasal bersumber pada dana APBN. Kurangnya kolaborasi anggaran baik oleh pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat, menyebabkan penyelesaian permasalahan infrastruktur di kawasan permukiman kumuh menjadi kurang maksimal. Selain itu pencairan anggaran yang sering terlambat membuat penyelesaian kegiatan menjadi tidak tepat waktu dan cenderung tergesa-gesa sehingga menghasilkan pembangunan dengan kualitas infrastruktur yang kurang baik.

### b. SK Walikota tentang penetapan lokasi permukiman kumuh

Penetapan lokasi deliniasi kumuh berpedoman pada SK Walikota Semarang tentang penetapan kawasan permukiman kumuh. Setelah implementasi program KOTAKU ternyata beberapa kawasan yang berada di dalam SK, setelah dilakukan verifikasi skor kumuh masuk dalam kategori tidak kumuh, sedangkan permukiman lain yang memiliki lingkungan lebih kumuh, tidak masuk SK. Sehingga dalam pelaksanaan program, hal tersebut menjadi faktor

penghambat, karena anggaran yang ada tidak boleh dilaksanakan di luar SK.

## **5.2 REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti merekomendasikan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan evaluasi tentang penetapan lokasi permukiman Kumuh, di karenakan beberapa lokasi permukiman kumuh yang tidak masuk didalam SK penetapan lokasi permukiman kumuh ternyata kondisinya ada yang lebih kumuh daripada lokasi permukiman yang berada di dalam SK Walikota tentang penetapan lokasi permukiman kumuh di Kota Semarang
2. Perlu adanya upaya pemerintah daerah dalam mendorong terwujudnya kolaborasi anggaran khususnya penyediaan anggaran khusus melalui dana APBD kota maupun mendorong peran CSR untuk ikut berpartisipasi dalam pengurangan permukiman kumuh di Kota Semarang.